
JURNAL RISET AKUNTANSI

GOING CONCERN

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengusaha Restoran dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Kota Kotamobagu
Oleh Inggriani Elim Dosen Jurusan Akuntansi FE UNSRAT

Pengaruh Alokasi Belanja Modal Terhadap Belanja Pemeliharaan dalam Anggaran Pemerintah Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan
Oleh Jenny Morasa Dosen Jurusan Akuntansi FE UNSRAT

Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pendapatan pada Perum Pegadaian Cabang Manado
Oleh Meilly Kalalo Dosen Jurusan Akuntansi FE UNSRAT

Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan dan Revaluasi Aktiva Tetap Untuk Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk)
Oleh S.S. Pangemanan Dosen Jurusan Akuntansi FE UNSRAT

Pengaruh Informasi Akuntansi Manajemen dan Partisipasi Manajer dalam Penganggaran Terhadap Kinerja Manajer Perhoteian Manado
Oleh Harijanto Sabijono Dosen Jurusan Akuntansi FE UNSRAT

Pengaruh Laba Kotor Dan *Size* Perusahaan Terhadap *Expected Return* Saham dan *Firm Value* pada Perusahaan *Go Public* di BEI
Oleh I Gede Suwetja Dosen Jurusan Akuntansi FE UNSRAT

Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dari Segi Modernisasi Prosedur Organisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan
Oleh Stanley Kho Walandow Dosen Jurusan Akuntansi FE UNSRAT

Analisis Financial Sustainability Ratio Pada BCA Tbk
Oleh Robert Lambey Dosen Jurusan Akuntansi FE UNSRAT

Over Reaksi Terhadap Harga Saham dan Volume Perdagangan
Oleh Novi Swandari Budiarto Dosen Jurusan Akuntansi FE UNSRAT

Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 – 2009 (Studi Kasus pada Dinas PPKAD selaku SKPKD)
Oleh Ventje Ilat Dosen Jurusan Akuntansi FE Unsrat



**PELAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE Tahun 2008 – 2009
(Studi Kasus pada Dinas PPKAD selaku SKPKD)**

**Oleh
Ventje Ilat
Dosen Jurusan Akuntansi FE UNSRAT**

Abstrak

Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang – undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, setiap Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) harus menyusun Laporan Keuangannya dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang merupakan perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dimana dalam penelitian ini, dianalisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD untuk tahun anggaran 2008 dan 2009.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian pencatatan dan pelaporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008 dan 2009 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif yang berbentuk studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu angka – angka Realisasi Anggaran, Neraca, dan Arus Kas. Penulis menggunakan metode studi kepustakaan, survei lapangan, dan studi dokumentasi untuk pengumpulan data yang diperlukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dengan baik untuk tahun 2008 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan untuk tahun 2009 belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun, Laporan Keuangan telah disajikan tepat waktu sehingga bisa dipergunakan bagi para pemakai sebagai pengambil keputusan.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia sebelum era reformasi dapat dinilai kurang pesat. Pada waktu itu, akuntansi sektor publik kurang mendapat perhatian yang serius. Orientasi pembangunan lebih banyak diarahkan pada pembangunan sektor industri (bisnis) dan cenderung mengabaikan pembangunan sektor publik. Dengan adanya era reformasi, terdapat tuntutan untuk meningkatkan kinerja organisasi sektor publik agar lebih berorientasi pada terciptanya *good public and corporate governance*. Akuntansi sektor publik memiliki peran yang strategis dan sentral dalam mewujudkan *good public and corporate governance* tersebut, Mardiasmo, (2002).

Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi Tahun 1998. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang mereformasi berbagai hal, termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah. Reformasi tersebut awalnya dilakukan dengan mengganti Undang – undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Pemerintahan di Daerah dengan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 yang menggantikan UU Nomor 32 Tahun 1956 tentang Keuangan Negara dan Daerah.

Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut berisi mengenai perlunya dilaksanakan otonomi daerah, sehingga Undang – undang tersebut sering disebut dengan Undang – undang Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Perkembangan reformasi terus berlanjut dengan diterbitkannya Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai perubahan dan penyempurnaan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai perubahan dan penyempurnaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999. Akibatnya, sebagai konsekuensi, peraturan perundang – undangan di bawahnya juga harus disesuaikan, Abdul Halim, (2007).

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang – undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah. Kewenangan yang dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran, di sisi lain tuntutan transparansi dalam sistem Pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.

Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara / daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan

dapat diandalkan (*reliable*), serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku secara umum. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 Tahun 2007, yang merupakan perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, pada tanggal 5 April 2007 lalu, pemerintah telah mengeluarkan sejenis petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) melalui Surat Edaran Mendagri No. SE.900/316/BAKD tentang "Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah" untuk memperinci Permendagri No. 13 Tahun 2006. Semua peraturan ini mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN / APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

2. LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Akuntansi Pemerintahan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengiktisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.

Menurut Bahtiar Arif, dkk (2009), Akuntansi pemerintahan menjadi aktivitas pemberi jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah kepada para pengguna berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengiktisaran transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

2.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

2.3 Akuntansi Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

Dalam konstruksi keuangan daerah terdapat dua jenis satuan kerja yaitu :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 mengatur tentang Prosedur Akuntansi pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai PPKD yaitu meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisiran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Sistem akuntansi dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi, yaitu :

1. Analisis Transaksi
Langkah awal dalam melakukan akuntansi untuk perkiraan-perkiraan yang ada dalam laporan keuangan SKPKD (terutama penjurnalan) adalah melakukan analisis transaksi. Jika tidak memahami makna dari transaksi tersebut, maka akan sulit untuk menentukan perkiraan mana yang didebet dan mana yang dikredit. Masing-masing elemen dari Laporan Keuangan dapat bertambah maupun berkurang. Halim, (2007).
2. Jurnal
Jurnal adalah catatan kronologis akuntansi dari transaksi-transaksi entitas, Horngren, (2006). Penjurnalan adalah prosedur pencatatan transaksi keuangan pada buku jurnal .
3. Posting ke Buku Besar
Buku besar adalah catatan yang berisikan seluruh akun. Menurut Halim (2007), Rekening / perkiraan / akun merupakan kumpulan informasi dalam suatu sistem akuntansi. Rekening – rekening yang digunakan untuk mencatat secara terpisah pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
4. Neraca Saldo
Neraca saldo adalah daftar rekening – rekening beserta saldo yang menyertainya (Abdul Halim, 2007). Neraca saldo disusun untuk memastikan bahwa buku besar secara sistematis adalah akurat dengan pengertian bahwa jumlah saldo-saldo debet selalu sama dengan saldo-saldo kredit. Namun keseimbangan bukan berarti catatan-catatan akuntansi benar-benar akurat. Untuk menyiapkan neraca saldo, saldo tiap perkiraan harus ditentukan terlebih dahulu.
5. Jurnal Penyesuaian
Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo rekening-rekening ke saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi, atau untuk memisahkan antara pendapatan dan beban dari suatu periode dengan periode lain, Abdul Halim, (2007).
6. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
Prosedur akuntansi berikutnya adalah penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu neraca saldo yang disusun setelah membuat jurnal – jurnal penyesuaian. Apabila dalam tahap penyesuaian muncul rekening baru, maka rekening baru ini juga dimasukkan dalam neraca saldo setelah penyesuaian.
7. Laporan Keuangan
Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, laporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Neraca
 - c. Laporan Arus Kas
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

8. Jurnal Penutup

Menurut Halim (2007), jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo nominal (*temporary*) menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Perkiraan nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan dan Belanja.

Sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor : SE.900/316/BAKD, Prosedur Pencatatan Akuntansi Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) meliputi :

1. Akuntansi Pendapatan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara / daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2. Akuntansi Belanja

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara / daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

3. Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan pemerintah yang mempunyai dampak terhadap penerimaan dan/atau pengeluaran pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun - tahun anggaran berikutnya.

4. Akuntansi Aset

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan di harapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber – sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

5. Akuntansi Hutang

Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor SE.900/316/BAKD, prosedur akuntansi hutang pada SKPKD merupakan pencatatan atas pengakuan hutang jangka

panjang yang muncul dari transaksi pengeluaran pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

6. Akuntansi Konsolidator

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dibangun dengan sebuah arsitektur seperti Akuntansi cabang di Sektor Swasta. Maka, dalam pelaksanaan transaksinya, SKPKD diibaratkan sebagai kantor pusat (*home office*) dan SKPD sebagai kantor cabang (*branch office*).

7. Akuntansi Selain Kas

Prosedur akuntansi selain kas pada SKPKD meliputi :

- a. Koreksi kesalahan pencatatan
- b. Pengakuan aset, hutang, dan ekuitas
- c. Jurnal terkait dengan transaksi yang bersifat *accrual* dan *prepayment*

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data

Data merupakan keterangan – keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain-lain. (Hasan, 2008:19). Berdasarkan sifatnya, data dibedakan menjadi data kuantitatif dan kualitatif.

1. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). (Kuncoro, 2003:124).
2. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik (angka). (Kuncoro, 2003:124).

3.2 Sumber Data

Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan atas dua, yaitu data primer dan data sekunder. (Hasan, 2008:19).

1. Data primer, biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. (Kuncoro, 2003:127).
2. Data sekunder, biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. (Kuncoro, 2003:127).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kuisisioner, yaitu dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada PPKD untuk dijawab.
2. Observasi, merupakan langkah pengumpulan data yang dilakukan penulis secara langsung ke lembaga pemerintahan yang menjadi objek penelitian.
3. Teknik wawancara, yaitu dalam metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.

3.4 Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif dalam bentuk studi kasus yaitu suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta, dengan membandingkan antara sistem pelaporan keuangan yang dilaksanakan di SKPKD dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan bagian integral dari Propinsi Sulawesi Utara, dengan ibukota Tahuna. Terletak antara 2°52'47" - 4°44'22" lintang utara dan 125°9'28" - 125°56'57" bujur timur berada diantara Pulau Sulawesi dan Pulau Mindanao (Republik Filipina) sehingga Kabupaten Kepulauan Sangihe disebut Daerah Perbatasan. Bagian utara berbatasan dengan Republik Filipina, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Talaud dan laut Maluku, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sitaro dan bagian barat berbatasan dengan laut Sulawesi.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas bertindak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Pencatatan

a. Penerapan Akuntansi Pendapatan

Sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diperbaharui menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007, pendapatan daerah yang ada di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah dirinci menurut organisasi, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan. Demikian juga akuntansi pendapatan sudah dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat sebesar harga bruto bukan harga setelah dikompensasi dengan pengeluaran. Pendapatan yang diterima langsung disetor ke kas daerah pada hari yang sama.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah menerapkan siklus akuntansi mulai dari pencatatan transaksi ke dalam jurnal, posting ke buku besar, penyusunan

neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, membuat neraca setelah penyesuaian, menyusun laporan keuangan dan membuat saldo penutup di akhir periode.

b. Penerapan Akuntansi Belanja

Pencatatan belanja pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah dikelola sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diperbaharui menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007, baik untuk belanja Uang Persediaan (UP) / Tambah Uang (UP) / Ganti Uang (GU) maupun untuk belanja LS – Gaji dan Tunjangan dan LS – Barang dan Jasa.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah menerapkan siklus akuntansi mulai dari pencatatan transaksi ke dalam jurnal, posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, membuat neraca setelah penyesuaian, menyusun laporan keuangan dan membuat saldo penutup di akhir periode.

Tetapi untuk tahun Anggaran 2008 terjadi kelebihan pembayaran tunjangan umum dan fungsional sehingga membebani keuangan daerah senilai Rp. 12,18 miliar. Sehingga laporan keuangan untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk Tahun Anggaran 2008 diberi opini Wajar Dengan Pengecualian oleh BPK. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 (pasal 4 dan pasal 38), yang merupakan perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Penerapan Akuntansi Pembiayaan

Pencatatan akuntansi pembiayaan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, sudah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diperbaharui menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007, yaitu untuk penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran), dan untuk pengeluaran pembiayaan, diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

d. Penerapan Akuntansi Aset

Aset yang dimaksud disini adalah aset tetap. Akuntansi aset tetap merupakan lanjutan dari pencatatan akuntansi belanja yang menghasilkan Aset Tetap. Akuntansi Aset Tetap untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi terhadap penambahan aset. Untuk tahun anggaran 2008, akuntansi aset untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah dicatat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.

Khusus untuk aset tahun 2009 tidak ada pencatatan atas aset tetap TV Perbatasan sehingga laporan keuangan untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 diberi opini Tidak Wajar oleh BPK. Hal ini tidak sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 paragraf 72.

- i. Penerapan Akuntansi Hutang / Kewajiban
Pencatatan akuntansi hutang pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah dicatat dan diungkapkan dengan benar, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri No. 59 Tahun 2007, yaitu kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul dan pengukurannya telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan yaitu dicatat sesuai dengan nilai nominalnya.
 - f. Penerapan Akuntansi Konsolidator
Pencatatan akuntansi konsolidator pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah dicatat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diperbaharui dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007.
 - g. Penerapan Akuntansi Selain Kas
Pencatatan akuntansi selain kas pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diperbaharui menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007.
2. Analisis Laporan Keuangan
- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada umumnya telah menyusun Laporan Keuangan tahunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007, yang merupakan perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan rincian sebagai berikut :
- a. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya selama satu periode (satu tahun).
 - b. Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada saat akhir (tanggal) tahun anggaran.
 - c. Laporan Arus Kas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas aset investasi non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran selama satu tahun anggaran.
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal – hal berikut :
 - i. Informasi tentang kebijakan fiscal / keuangan, ekonomi makro, dan pencapaian target
 - ii. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - iii. Informasi tentang dasar penyusunan Laporan Keuangan
 - iv. Kebijakan Akuntansi
 - v. Penjelasan Laporan pos-pos keuangan
 - vi. Penjelasan atas informasi non keuangan

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada umumnya telah melakukan pencatatan akuntansi yang baik (untuk tahun 2008 & 2009), yang meliputi akuntansi pendapatan, akuntansi belanja, akuntansi pembiayaan, akuntansi aset, akuntansi hutang, akuntansi konsolidator, dan akuntansi selain kas, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah baik untuk Jurnal, Buku Besar, Neraca Saldo, Jurnal Penyesuaian, Neraca Saldo Setelah Penyesuaian, dan Jurnal Penutup. Kecuali untuk akuntansi belanja pada tahun 2008 belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 pasal 4 dan pasal 38 yaitu terjadi kelebihan belanja tunjangan dan fungsional sehingga membebani keuangan daerah dan akuntansi aset pada tahun 2009 belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 paragraf 72 (tidak ada pengakuan terhadap Aset Tetap – TV Perbatasan).
2. Untuk penyusunan Laporan Keuangan (khusus Tahun 2008 & 2009) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan dimana format dan uraian perkiraan secara umum telah diklasifikasikan dengan tepat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Untuk Laporan Keuangan Tahun 2008 karena pada akuntansi belanja yang terjadi kelebihan pembayaran belanja tunjangan dan fungsional maka Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.
4. Untuk Laporan Keuangan Tahun 2009 karena pada akuntansi aset tidak ada pengakuan terhadap Aset Tetap – TV Perbatasan, maka Laporan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

5.2 Saran

Beberapa hal yang diusulkan oleh penulis kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD, yaitu :

1. Untuk tahun anggaran berikutnya, hendaknya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berpedoman sepenuhnya pada peraturan – peraturan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, agar Pengelolaan Keuangan Daerah dapat terwujud dengan efektif dan efisien, dan Laporan Keuangan yang disajikan dapat lebih bermanfaat bagi para pengguna Laporan Keuangan.

2. Perlu adanya sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah (SKPKD). Sumber daya manusia ini dapat diperoleh dengan perekrutan pegawai dengan kualifikasi dibidang akuntansi yang memadai dan sebaiknya diberikan bimbingan dan pelatihan teknis kepada sumber daya manusia yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Bahtiar, dkk. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : PT. Indeks.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2009. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2009*.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.
- Hartina, Silka, 2009. *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Langkat*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Hasan, Iqbal. 2008. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hidayah, Nurul. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah & Swasta*. Modul Universitas Mercu Buana. Jakarta.
- Hornigren T, Charles, dkk. 2006. *Akuntansi, Jilid 1, Edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Indrianto, N, Supomo, B. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : BPFE.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Noviana, Endah, 2009. *Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada SKPD di Pemerintah Kota Medan (studi kasus pada Dinas Tata Kota Bangunan)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Pangesti, Karunia Sari Nur, 2008. *Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan SKPD : studi kasus penerapan Permendagri No. 13 Tahun 2006 di pemerintah*

daerah Kabupaten Batang. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang *Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan.*

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah.*

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*

Sabeni, Arifin. 2008. *Pokok – pokok Akuntansi Pemerintahan Edisi 4.* Yogyakarta : BPFE.

Salamun, Suyono, 2007. *Analisis Laporan Keuangan Daerah,* Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Tangerang.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : SE.900/316/BAKD. 2007. *Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.* Jakarta : Penerbit BP. Cipta Karya.

Tanjung, Abdul Hafiz. 2008. *Akuntansi Pemerintahan Daerah: Konsep dan Aplikasi.* Cetakan kedua. Bandung : Alfabeta.

Tanjung, Abdul Hafiz. 2008. *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah.* Cetakan Pertama. Bandung : Alfabeta.

www.google.com